

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kritikan terhadap konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam dekade terakhir ini telah memunculkan beberapa konsep baru, salah satunya adalah konsep *open government* yang berusaha mencari cara baru dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik untuk mengatasi berbagai permasalahan pemerintahan. Menurut Dr. Ir Slamet Soedarsono Dewan Pengarah OGI Bappenas (Soedarsono, 2022) pada bulan September tahun 2011 secara resmi *open government* telah menjadi gerakan penting diantara pemerintahan di seluruh dunia, beberapa negara yang memprakarsai *open government* ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mencegah tindakan korupsi serta memanfaatkan teknologi untuk menjadikan pemerintah yang lebih efektif dan akuntabel. (Andika, 2017)

Menurut Dr. Ir Slamet Soedarsono bahwa gerakan *open government* diinisiasi oleh pemerintah Barack Obama pada tahun 2008, yang dilatarbelakangi oleh kondisi pemerintahan Amerika Serikat yang pada waktu itu mengalami era tertutupan yang berlangsung cukup lama, seperti sulitnya mengakses informasi, sulitnya melacak pembelanjaan uang pajak dan keberadaan kelompok lobbyist yang mendominasi pengambilan keputusan politik. (Soedarsono, 2022) Kemudian Presiden Barack Obama meyakini bahwa kunci untuk mendobrak sistem pemerintahan yang lama adalah dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas. Sebuah standar baru mengenai transparansi tersebut kemudian dituangkan melalui memorandum untuk pemerintahan terbuka yang ditandatangani ketika presiden Barack Obama menjabat dihari pertama. Memorandum kemudian dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Presiden mengenai intruksi *open government* atau pemerintahan terbuka. *Open government* tersebut hadir dengan menawarkan berbagai solusi cerdas untuk menyelesaikan masalah secara tepat dan cepat, solusi cerdas tersebut adalah dengan menetapkan kode etik yang mampu mencegah adanya campur tangan kelompok *lobbyist* dalam penyelenggaraan pemerintahan

sehingga dapat meminimalisir adanya dampak dari kelompok kepentingan tertentu. Kemudian, mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan pembelanjaan anggaran kepada masyarakat melalui website ataupun media cetak lainnya. Selain itu pemerintah juga harus memberdayakan masyarakat melalui transparansi yang lebih luas dan memanfaatkan teknologi agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. (Soedarsono, 2022)

Kemudian inisiatif Presiden Barack Obama tersebut dikampanyekan secara global hingga menjadi kesepakatan antara negara-negara yang memutuskan untuk bergabung sebagai *Open government* Patnership. Salah satu negara yang memutuskan untuk bergabung sebagai *Open government* Patnership adalah negara Indonesia. Yang bergabung secara resmi sebagai salah satu negara perintis gerakan *open government* bersama 7 negara lain, seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, Brazil, Filipina, Inggris, Meksiko, dan Norwegia pada tanggal 20 September 2011. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020 jumlah negara anggota *open government* mengalami peningkatan sebanyak 78 negara. sistem *open government* ini merupakan langkah baru dalam sistem tata kelola pemerintahan ditingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. (Selfia, 2020)

Secara argumentatif dari para peneliti terdahulu tentang *open government*, ada beberapa hal penting yang penulis perhatikan dalam *open government* adalah tersedianya data yang akurat dan kredibel serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian data yang sudah tersedia didukung dengan penyajian dalam bentuk media cetak atau media massa yang dikemas secara apik akan mampu menarik minat dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan. Selain itu komitmen dan pola pikir aparatur pemerintah untuk mendukung pelaksanaan *open government* ini sangat penting.

Berdasarkan penuturan (Alvin Mujahid) selaku Ketua PPID membahas sejarah awal OGP dan Pilot Project Open Government Parthnership di Kabupaten Bojonegoro khususnya Desa Pejambon. bahwa pada 20 September 2011, Open Government Partnership (OGP) secara resmi diluncurkan oleh 8 negara pendiri diantaranya Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan,

Inggris dan Amerika Serikat yang menyetujui Deklarasi Pemerintahan Terbuka, dan mengumumkan rencana aksi masing-masing negara. Dengan menyetujui deklarasi tersebut, artinya negara Indonesia ikut berkomitmen dalam upaya mendorong keterbukaan pemerintah yang memberdayakan dan melayani masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel. (Mujahid, 2022)

Alvin Mujahid juga menegaskan tentang sejarah perjalanan OGP dari tingkat internasional hingga sampai lokal atau desa berdasarkan seminar OGP yang beliau ikuti selama ini menjadi Ketua PPID:

“Dari tahun ke-tahun, jumlah negara anggota Open Government Partnership terus bertambah pada tahun 2014 jumlah negara anggota Open Government Partnership (OGP) adalah 64 Negara, pada tahun 2016 berjumlah 75 Negara dan pada tahun 2019 berjumlah 79 negara. Pada tahun 2016 akhir, OGP ditingkat internasional membangun gagasan baru yaitu penerapan OGP ditingkat subnational/daerah. Ada lima Pilot Project Open Government Partnership atau daerah percontohan pemerintah terbuka diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung Dan Kabupaten Bojonegoro. Dalam ajang Pilot Project ini, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan banyak perhatian atas pelaksanaan pemerintah terbuka yang telah berhasil diterapkan pada pemerintahannya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu instansi pemerintahan di Indonesia yang terdepan dalam menerapkan gerakan Open Government Partnership (OGP) dibandingkan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Kang Yoto-Kang Hartono, telah berhasil menerapkan Open Government atau pemerintah terbuka. Dikatakan demikian karena dari semua daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi pilot project atau percontohan pemerintah terbuka Open Government Partnership

(OGP) dunia dan menjadi satu-satunya daerah yang berhasil mewakili Indonesia dalam ajang tersebut.” (Mujahid, 2022)

Secara khusus, berdasarkan penuturan Alvin Mujahid, yang mewakili Negara Indonesia dalam ajang *Open government* adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (Mujahid, 2022) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dianggap menjadi salah satu contoh instansi pemerintahan di Indonesia yang terdepan dalam mengimplementasikan prinsip Open Government. Dapat dikatakan demikian karena secara transformatif, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu menerapkan nilai-nilai transparansi ke dalam proses kerja pemerintah. Dimana pendekatannya yang dilakukan sendiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kemudian merealisasikan ke dalam pendekatan struktural hingga akhirnya mampu merubah budaya kinerja pemerintahan (Andika, 2017).

Budaya kinerja pemerintahan dalam bentuk sistem *open government* tersebut dilaksanakan karena mampu menjawab berbagai permasalahan di Kabupaten Bojonegoro terkait transparansi, kemudahan akses informasi pelayanan publik, dan kebijakan pemerintah yang dianggap masih kurang. Oleh karena itu, Kemampuan dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan sistem *open government* ini, menjadikan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu percontohan pemerintah daerah terbuka bersama 14 daerah lainnya di dunia pada tahun 2016 (Huda m. M., 2018). Hingga saat ini terdapat 20 pemerintah daerah di dunia yang telah bergabung sebagai *Open government* Patnership, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pemerintahan Daerah Terbuka di Dunia Tahun 2016

NO	DAFTAR PEMERINTAHAN NEGARA TERBUKA DI DUNIA
1	Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia
2	Austin, Texas, AS
3	Seoul, Korsel
4	Paris, Prancis
5	Ontario, Kanada
6	Negara Basque, Spanyol

7	Cotabato Selatan, Filipina
8	Kigoma, Tanzania
9	Madrid, Spanyol
10	Narino, Kolombia
11	Skotlandia, Inggris Raya
12	Sekondi-Takoradi, Ghana
13	Tbilisi, Georgia
14	Sao Paolo, Brazil
15	Jalisco, Meksiko
16	Buenos Aires, Argentina
17	Negara Bagian Kaduna, Nigeria
18	Elgeyo, Marekwet, Kenya
19	Iasi, Rumania
20	La Libertad, Peru

Sumber: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership

Selain itu, pernyataan Alvin Mujahid juga didukung oleh Abdur Rokhman selaku Kepala Desa Pejambon yang selalu mengikuti rapat bersama Bupati Bojonegoro tentang perencanaan dan pelaksanaan OGP di seluruh Kabupaten Bojonegoro, menurut Abdur Rokhman:

‘‘Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Open Government Partnership yang diadakan di Paris, Perancis pada tahun 2016, Kabupaten Bojonegoro ikut hadir sebagai panelis dan menjadi satu-satunya daerah yang menjadi perwakilan asia tenggara, juga ada Kota Seoul Korea Selatan dan Tbilisi Georgia. Keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejajar dengan Paris, Scotland, Madrid, dan 20 kota percontohan Open Government Partnership di dunia. Di Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa pintu-pintu keterbukaan diantaranya Open Data Contact, Dialog Publik, SMS Radio, Blusukan, LAPOR pintu-pintu keterbukaan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan perwujudan dari gerakan Open Government Partnership (OGP) Dalam pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro, terdapat empat hal utama menjadi kunci pelaksanaannya yaitu transparansi,

partisipasi dan akuntabilitas dan inovasi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan kolaborasi empat sekawan yang dikenal dengan kolaborasi ABGC yaitu keterlibatan dan melibatkan Akademisi, Bussines, Government dan Community dalam perumusan berbagai kebijakan. Pada tahun 2018-2020, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 rencana aksi di Open Government Partnership. Lima rencana aksi tersebut :1) Percepatan penanggulangan kemiskinan multidimensi 2) Penguatan keterbukaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 3) Smart City dan keterbukaan pemerintah desa 4) Pembangunan inklusif dan responsif gender 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik (sektor kesehatan dan administrasi kependudukan) (Opengovbojonegoro.com). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menerapkan Open Government Partnership (OGP) diseluruh wilayah Bojonegoro tepatnya di 430 desa, tetapi sejauh ini baru beberapa desa saja yang sudah menerapkan sistem tersebut. Salah satunya adalah Desa Pejambon. Desa Pejambon merupakan salah satu desa yang memiliki luas wilayah 189.190 Ha dan jumlah penduduk sekitar 2126 jiwa. Sejak tahun 2016 akhir, Desa Pejambon telah menerapkan Open Government Partnership (OGP). Dengan adanya Open Government Partnership (OGP), pemerintah desa berharap bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa terutama infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur yang memadai adalah suatu hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih banyaknya jalan-jalan yang tidak layak pakai atau rusak serta tidak tersedianya fasilitas infrastruktur lainnya seperti irigasi, drainase, gedung posyandu, gedung sekolah mendorong pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan infrstruktur.” (Rokhman, 2022)

Terkait dengan penerapan pemerintah terbuka, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga berusaha menerapkan *open government* di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, tepatnya pada 419 desa, akan tetapi baru 50 desa yang sudah mampu melaksanakan *open goverment*. 50 desa tersebut masih dibagi kedalam tiga kategori, yaitu Desa terbuka terdiri dari 7 Desa, Desa menuju terbuka

terdiri dari 31 Desa, dan Desa kurang terbuka terdiri dari 12 Desa (Huda M. M., 2019). Berikut merupakan tabel informasi mengenai perolehan nilai Desa Terbuka di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1.2 Desa Terbuka di Kabupaten Bojonegoro

No	Desa	Kecamatan	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi	Inovasi	Nilai
1	Pejambon	Sumberejo	25,01	29,06	23,2	16,87	90,20
2	Kauman	Bojonegoro	24,03	28,14	22,3	15,45	88,24
3	Tlogorejo	Kepuhbaru	23,41	27,98	21,9	14,98	86,32
4	Mojodeso	Kapas	21,01	27,05	21,3	13,97	83,33
5	Deru	Sumberejo	21,23	26,25	21,1	13,65	82,23
6	Sukoharjo	Kalitidu	16,9	28,65	21,7	12,26	79,51
7	Kandangan	Trucuk	21,99	23,75	19,08	12,52	77,34

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa diantara ke-tujuh Desa, Pemerintah Desa Pejambon menduduki peringkat pertama dalam kategori Desa Terbuka di Kabupaten Bojonegoro dengan perolehan nilai sebesar 90,20. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pejambon telah berhasil menerapkan pengelolaan *open goverment* dengan baik.

Selain itu, Pemerintah Desa Pejambon juga telah meraih banyak penghargaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Prestasi Desa Pejambon

2015	Juara II (Dua) Lomba Tertib Administrasi Dan Kearsipan tahun 2015 tingkat Kabupaten Bojonegoro.
2015	Juara II (dua) Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Bakorwil Bojonegoro.
2016	Juara II (Dua) Lomba Desa Tingkat Kabupeten Bojonegoro.

2016	Juara II (Dua) Lomba Gerakan Desa Sehat dan Cerdas tingkat Kabupaten Bojonegoro.
2016	Juara III (Tiga) Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar tingkat Kabupaten Bojonegoro.
2016	Juara I (satu) Lomba Desa <i>Open goverment</i> Tingkat Kabupaten Bojonegoro.
2017	Juara Harapan I Lomba perpustakaan Desa tingkat Jawa Timur.
2017	Desa terbaik I (satu) dalam pengelolaan Dana desa tingkat Kabupaten Bojonegoro.
2017	Juara I (satu) Lomba Desa Terinformatif tingkat Jawa Timur.
2017	Penghargaan Kepala Desa sebagai Pelopor Desa Terbuka.
2018	Desa terbaik I (satu) dalam kategori Layanan Informasi dan Transfaransi Publik tingkat kabupaten Bojonegoro.
2020	Pelopor Desa Terinformatif dalam pengelolaan administrasi desa dan pengembangan SID

Sumber: <https://pejambon-bjn.desa.id/>

Capaian-capaian yang telah diraih Desa Pejambon tersebut didasari kuat oleh semangat partisipasi masyarakat yang menginginkan pemerintahan terbuka, hal ini senada dengan pernyataan bapak Alvin Mujadid selaku sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Pencapaian desa Pejambon untuk melakukan inovasi open goverment secara sukses tersebut didasari oleh semangat partisipasi masyarakat yang mengharapkan kemudahan aksesibilitas dan transparansi informasi publik, hal ini dikarenakan sebelum diterapkannya open goverment, Pemerintah Desa Pejambon dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang tak

kunjung ditemukan jalan keluarnya, seperti sering adanya kecemburuan sosial (antara masyarakat Dusun dengan masyarakat Krajan) yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran serta minimnya transparansi. Kemudian adanya sentimen negatif dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Desa terutama dalam hal kualitas layanan, pengelolaan anggaran dan pembangunan. Serta kurangnya ketersediaan ruang publik yang kemudian menghambat proses masuknya aspirasi dari masyarakat”. (Mujahid, Capaian-capaian desa Pejambon, 2022)

Untuk mengkaji lebih dalam keberhasilan pelaksanaan *open government* khususnya di Desa Pejambon, penulis memandang teori partisipasi sebagai langkah yang tepat. Karena partisipasi atau kerjasama ini merupakan sebuah usaha dan respon dari Pemerintah Desa Pejambon untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki dalam penyelenggaraan program *open government*. Keterbatasan tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Sufyan selaku Sekretaris PPID/Kaur Umum Desa sekaligus Tokoh Masyarakat Pejambon yang dulu juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Kondisi awal desa yang memprihatinkan serta keinginan banyak masyarakat mengharuskan Pemerintah Desa berkolaborasi dengan lembaga lain yaitu dikarenakan adanya keterbatasan perangkat Desa dibidang IT, sehingga untuk memenuhi kekurangan tersebut Pemerintah Desa bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Kemudian juga terdapat keterbatasan anggaran yang digunakan untuk pengembangan akses dan infrastruktur pendukung layanan partisipasi masyarakat, dalam hal ini Dinas Kominfo selalu melakukan pendampingan, pelatihan dan memberikan suntikan bantuan berupa desain website desa, pemberian Layanan Informasi Digital (layar LCD) dan lain-lain. Dulu juga terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah desa yang dianggap belum adil dan merata dalam

pelaksanaan pembangunan, hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, tidak transparan dalam pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik yang diberikan hanya memprioritaskan kerabat dari perangkat desa. Hal tersebut kemudian berakibat pada sikap masyarakat yang acuh dan cenderung pasif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Maka dari itu, revolusi sistem ini didasari kuat oleh keinginan masyarakat yang menginginkan keterbukaan informasi, kemudahan layanan, dan peningkatan partisipasi. Sehingga dengan adanya hal tersebut mampu menjadikan masyarakat hidup sayup rukun dan saling gotong-royong.” (Sufyan, 2022)

Terkait keterbatasan anggaran yang digunakan untuk pengembangan akses dan infrastruktur pendukung layanan partisipasi masyarakat, dapat dilihat dari RPJM Desa Tahun 2014-2019, yang mengungkapkan bahwa dana yang tersedia masih jauh lebih kecil dari besarnya aspirasi masyarakat pada saat melakukan Musrembang, sehingga hal tersebut menimbulkan kesan bahwa aspirasi dari masyarakat banyak yang diabaikan ataupun pembangunan yang dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Tahun	RKP	APBDES
2014	6.075.000.000	1.257.000.000
2015	1.143.000.000	1.314.376.410
2016	1.417.000.000	1.542.587.805
2017	1.668.235.190	1.623.917.200
2018	1.650.235.000	1.713.619.400
2019	1.835.110.000	2.109.229.100
2020	4.618.001.000	1.833.266.900

Sumber: www.pejambon-bjn.desa.id

Penelitian ini akan menjelaskan secara ringkas alasan pemilihan Desa Pejambon sebagai bahan analisis penelitian terkait keberhasilan pelaksanaan Open Government, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Capain pemerintah Desa pejambon dalam menerapkan *Open goverment* didukung oleh andilnya partisipasi dari masyarakat dan berbagai stakeholder. Karena dalam membentuk sistem keterbukaan informasi yang mumpuni, dibutuhkan sumber daya yang tepat agar pengelolaan *open goverment* dapat dilakukan secara maksimal, berikut penjelasan dari Alvin Mujahid Sekretaris Desa Pejamnon atau Ketua PPID:

“Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan open goverment diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro yang memberikan sumbangsih dalam bentuk pembinaan, penentuan dan pelaksanaan Rencana Aksi Desa di bidang open goverment, hal ini terkait dengan terpilihnya pemerintah Desa Pejambon sebagai model desa Terbuka diantara 419 Desa dan 11 Kelurahan di Kabupoaten Bojonegoro. Kedua, adalah Lembaga Desa PPID yang bertugas sebagai tim pengelola kebijakan pelayanan Informasi publik serta menyebarluaskan data transparansi desa, ketiga, adalah NGO (Bojonegoro Institute) yang bertugas membantu mendorong dan mengembangkan Pemerintah Desa Pejambon menjadi Desa Terbuka, keempat adalah partisipasi dari masyarakat Desa Pejambon yang secara langsung berpartisipasi menginginkan adanya kemajuan dan perubahan”. (Mujahid, Capaian-capaian desa Pejambon, 2022) Alvin Mujahid Sekdes/Ketua PPID Desa Pejambon.

Hal tersebut merupakan sebuah bentuk adanya *collaborative goverment* dan keberhasilan partisipasi dari seluruh actor yang terlibat dalam pengembangan *open goverment* tersebut yang mana keterkaitan antar lembaga dan adanya partisipasi aktif masyarakat yang terlibat mampu memunculkan fenomena yang menarik untuk diteliti dalam perspektif kajian ilmu manajemen sumberdaya manusia.

2. Meskipun penerapan *open government* telah diterapkan di beberapa daerah atau desa, akan tetapi penerapan *open government* di Desa Pejambon ini memiliki karakteristik tersendiri yang unik, sehingga menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi. Hal ini terkait dengan pengelolaan *open government* yang diterapkan secara konsisten oleh Kepala Desa (Leadership) serta tingginya komitmen Pemerintah Desa dan adanya dukungan dari aspirasi masyarakat.
3. Keberhasilan penerapan *open government* di Desa Pejambon telah meraih banyak penghargaan di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sehingga tak heran Desa Pejambon sering dijadikan sebagai Desa Percontohan untuk desa-desa yang masih belajar menerapkan *open government*. Dalam hal ini, kelebihan Desa Pejambon dapat ditingkatkan lagi dan kekurangannya dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengambil fokus masalah yaitu **“Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dengan Adanya *Open Government* Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Di Desa Pejambon ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Menjelaskan partisipasi masyarakat dengan adanya *open government* dalam meningkatkan kualitas layanan di Desa Pejambon.

1.4 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Akademik

1. Manfaat akademik yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memperkaya kajian mahasiswa Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia mengenai partisipasi masyarakat dengan adanya *open government* dalam meningkatkan kualitas layanan.
2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.1.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai rekomendasi Pemerintah Desa Pejambon untuk meningkatkan dan mengembangkan program *Open Government*.
2. Sebagai pedoman untuk membuat dan melaksanakan setiap kebijakan atau program yang berkaitan dengan konsep *Open Government*.